Surakarta Accounting Review (SAREV)
Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Penerbit : **Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta**
ISSN ONLINE : 2723-0511

ANALISIS PERBEDAAN PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PPH PASAL 21 DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KARANGANYAR DAN PIONEER KARANGANYAR

Agustina Eka Stevi Anita[1)], Sarsiti[2)]
[1),2)] Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta
agustina02@gmail.com[1)], sitiunsa76@gmail.com[2)]

Abstract

Tax payment is the manifestation of citizen's obligation to contribute directly and collectively to paying dues in the attempt of national funding and development. Tax is a levy compulsorily paid by the people to the state and will be used for the government and public's interest. People paying tax will not benefit from the tax directly, because the tax is used for the public interest rather than the personal interest. Thus, clearly the role of tax revenue to a state becomes very dominant in supporting government wheel and development funding. Taxpayer can be personal or corporate, including tax payer, tax withholder and tax collector, having taxing right and obligation according to the provision of taxing laws.
The method employed was qualitative method with descriptive analysis by means of distributing questionnaire in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar. This research aimed to reveal the difference of behavior between Personal Taxpayers in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar, particularly the employees of Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar, over Article 21 of PPh. The result of research showed that there was no significant difference of behavior between Personal Taxpayers in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar. In other words, the difference of behavior between Personal Taxpayers in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar was insignificant. Therefore, empirically the result of score calculation for taxpayer's behavior was equal in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Karanganyar and Pioneer Karanganyar.

Keyword : Intention, Attitude, Behavior, Compliance, Article 21 of PPh, Personal Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, Apakah ada perbedaan perilaku Wajib Pajak orang pribadi atas PPh Pasal 21 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah

pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama lahir tahun 1983 dan berlaku per 1 Januari 1983 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 2008. Undang-Undang mengalami perubahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku per 1 Januari 2009.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong adalah pihak yang menerima penghasilan (pegawai, penerima pensiun, penerima upah, dan orang pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban (Radianto, 2010:75).

Perilaku Wajib Pajak

Menurut Arini dalam Astuti (2011) keperilakuan merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat bersifat mendukung atau menentang rangsangan tersebut. Apabila keperilakuan digabung dengan Wajib Pajak, maka keperilakuan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi Wajib Pajak terhadap apa yang dialaminya. Lebih spesifik lagi, keperilakuan Wajib Pajak berkaitan dengan apa yang dialami Wajib Pajak di bidang perpajakan, baik pada saat melapor, membayar, dan sebagainya.

Niat Wajib Pajak

Niat merupakan pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku, suatu hasil dari proses berfikir yang bersifat rasional. (Menurut Gibson et al, 1998 dalam Bernadetha Dwiana Agustini, 2016), proses berfikir yang bersifat rasional berarti bahwa dalam setiap perilaku yang bersifat sukarela maka akan terjadi proses perencanaan pengambilan keputusan yang secara konkrit diwujudkan dalam niat untuk melaksanakan suatu perilaku.

Kerangka Pemikiran

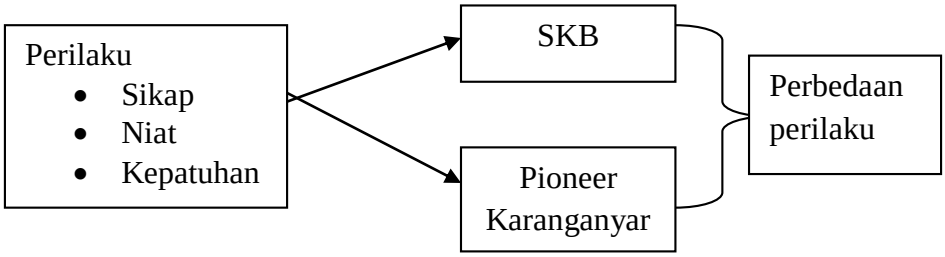

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut, Keperilakuan Wajib Pajak berkaitan dengan apa yang dialami Wajib Pajak di bidang perpajakan, baik pada saat melapor, membayar, dan sebagainya. Keperilakuan dapat bersifat mendukung dan menentang. Dalam hal ini akan peneliti perjelas dengan sifat Wajib Pajak yang mendukung selanjutnya akan disebut sikap yang patuh terhadap pajak, sedangkan sikap Wajib Pajak yang menentang selanjutnya akan disebut dengan sikap yang melawan pajak.

Sikap dikatakan sebagai bentuk evaluasi individu, terhadap objek psikologis yang ditunjukkan dengan keyakinan-keyakinan, perasaan atau perilaku yang diharapkan, sebagai suatu respon evaluatif yang

memberikan kesimpulan terhadap stimultan dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap.

Ho = Diduga tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku Wajib Pajak orang pribadi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar.

Ha = Diduga ada perbedaan yang signifikan antara perilaku Wajib Pajak orang pribadi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar.

Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi atas PPh Pasal 21. Perilaku Wajib Pajak orang pribadi atas PPh pasal 21 merupakan perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan sendiri.

Mendiskripsikan perilaku Wajib Pajak dengan indikator-indikator:

Sikap

Niat

Kepatuhan

Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 poin, yaitu:

STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi skala 1
TS	= Tidak Setuju	diberi skala 2
KS	= Kurang Setuju	diberi skala 3
S	= Setuju	diberi skala 4
SS	= Sangat Setuju	diberi skala 5

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Perbedaan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi atas PPH Pasal 21 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar dengan menyebar kuesioner ke seluruh pegawai, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05, ternyata data pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar adalah berdistribusi normal, karena nilai sign $> 0,05$.

Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar. Dengan kata lain, bahwa perbedaan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, secara empiris bahwa hasil perhitungan skor perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pioneer Karanganyar adalah sama.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait penulisan skripsi antara lain:

Diharapkan pada setiap Wajib Pajak untuk lebih memahami pentingnya membayar pajak, melaporkan pajak, dan mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Karena pajak memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah bersama-sama dengan instansi terkait agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak dan menumbuhkan minat untuk menjadi Wajib Pajak perorangan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mempertimbangan persebaran kuesioner yang digunakan sehingga akan diperoleh data yang lebih valid serta menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih memperhatikan jumlah responden dan lebih teliti memasukkan data, karena dari responden yang tidak seimbang dan kesalahan dalam memasukkan data, hasil olah data di atas terdapat perbedaan dalam hasil uji F dan uji t.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 1988. Constructing a TPH Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration September Crefised January: 2006

Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. Universitas Maria Kudus.

Amelia, Sophie Lubis. 2010. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Job Pertamina Medeo E&P Tomori Sulawesi).

Astuti, Yani Praja. 2011. Pengaruh Presepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. Universitas Indonesia.

Budiatmanto, A. 1999. "Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983: Studi Pada Kantor Wilayah VIII Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta". Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi PPS UGM.

Dwiana Agustini, Bernadetha. 2016. "Analisis Perbedaan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Atas PPH Pasal 21 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar". Universitas Surakarta.

Eagly, A. H. & Chaiken, S. 1993. The Psychology of Attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovitch.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPPS BD UNDIP

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., and Donnely, Jr, J. H. 1998. Organization: Behavior,Structur, Processes, Ninth Edition, Irwin.

Hardika, N. Santosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya.